BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bentuk kegiatan pelayanan publik dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dari hasil analisis penulis mengenai pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam penulisan laporan KKL ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori dari Wasistiono, dengan beberapa indikator yakni secara Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, yang menjadi landasan teori penulis bahwa kinerja organisasi Kecamatan Cimahi Tengah dalam pelaksanaan e-KTP tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang dialami oleh pemerintah, yaitu: Terdapat 45,689 warga Kecamatan Cimahi Tengah yang belum terekam untuk perekaman e-KTP.

1. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat.
2. Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat.
3. Kurangnya waktu pelayanan dalam perekaman e-KTP, yang membuat Kecamatan Cimahi Tengah dalam mencapai target hasil e-KTP tidak tepat waktu.
4. Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika pelaksanaan tersebut diterapkan. Dalam hal ini pemerintah kecamatan Cimahi Tengah kekurangan alat.
5. Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program e-KTP.

4.2 Saran-saran

1. Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program e-KTP, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator e-KTP dan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama.
2. Pemerintah sebaiknya mempunyai perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan persiapan pegawai, pengadaan alat, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul. Kemudian mencari solusi untuk setiap masalah tersebut.
3. Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang program e-KTP secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat.
4. Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan. Diharapkan sebagai satu hal yang dapat mengikat dan dapat meningkatkan kualitas pegawai.